

## **Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Daerah Perbatasan: Studi di SMP N 2 Bongan Kepulauan, Banggai Laut, Sulawesi Tengah**

**Trisandi, Ahmad Afrizal Rizqi**

Manajemen Pendidikan Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: trisandimpi@gmail.com, rizalahong25@gmail.com

### **Abstract**

*The implementation of School-based management in SMP N 2 Bongan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah encounters a number of problems. One of which is due to the isolated site of the school. This qualitative study describes the implementation of school based management in SMP N 2 Bongan kepulauan which is located in the outer border of Indonesia. Research data was gathered through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of the school based management in the school has not run effectively. The most significant problems that hinder the success of the implementation were incompetent human resources and the lack of society's participation.*

**Keywords:** School-Based Management, School Quality Improvement, Border Areas

### **Abstrak**

*Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMP N 2 Bongan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah memiliki permasalahan yang sangat kompleks, salah satu penyebabnya adalah letak sekolah di perbatasan pulau Timpaus sehingga terisolir. Penelitian ini akan mendeskripsikan MPMBS di sekolah perbatasan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan MPMBS di SMP N 2 Bongan Kepulauan belum berjalan dengan baik, salah satu penyebabnya adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai. Di samping itu, partisipasi masyarakat untuk turut meningkatkan mutu sekolah juga tergolong rendah.*

**Kata Kunci:** Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Sekolah Daerah Perbatasan

## Pendahuluan

Selama dekade sebelum tahun 2000-an, potret pendidikan di Indonesia menunjukkan tingkat progresivitas yang masih sangat rendah untuk berkembang dan maju.<sup>1</sup> Namun pada dekade terakhir ini, pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan terutama dalam aspek peningkatan mutu pada setiap sekolah. Hal tersebut dapat dilihat melalui progress pemerintah yang selalu melakukan inovasi dalam kurikulum pendidikan. Perubahan itu dilakukan karena adanya tuntutan zaman yang mengharuskan pendidikan di negeri ini ikut mengembangkannya agar dapat bersaing secara nasional maupun internasional.

Adanya persaingan global ini, tentu membawa implikasi terhadap perlunya pengembangan manajemen sekolah berbasis mutu yang menuntut adanya profesionalitas dari kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah maupun guru sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran di kelas.<sup>2</sup> Hal itu sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>3</sup> Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia yang tujuan utamanya untuk memanusiakan manusia, mendewasakan manusia, merubah perilaku, membudayakan dan meningkatkan kualitas manusia menjadi lebih baik.<sup>4</sup> Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah memberikan otonomi kepada setiap sekolah untuk

---

<sup>1</sup> Abdau Qur'ani Habib and Imam Machali, "Efektivitas Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Perspektif *Balanced Scorecard* Terhadap Mutu Pembelajaran Siswa Kelas XI dan Kelas XII di MAN Maguwoharjo Sleman," *Jurnal Pendidikan Madrasah* 1, no. 2 (2016), hlm. 214.

<sup>2</sup> EE Junaedi Sastradiharja, "Manajemen Sekolah Berbasis Kompetensi," *Mumtaz* 2, no. 2 (2018), hlm. 268.

<sup>3</sup> Elvia Ivada Sri Marsini, Sri Witurachmi, "Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) Di SMA N 1 Sukoharjo," *Jupe Uns* 1, no. 1 (2013), hlm. 2.

<sup>4</sup> Busthomi Ibrohim, "Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi Alternatif dalam Persaingan Mutu," *Al-Qalam* 22, no. 2 (2005), hlm. 172.

mengelola dan mengembangkan sekolah sesuai dengan kekhasan masing-masing.

Pengelolaan sekolah melalui desentralisasi pendidikan telah diserahkan oleh pemerintah kepada pihak sekolah agar dapat mengelola sekolah secara mandiri. Tujuannya untuk memberikan keluasaan kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah terutama meningkatkan mutu.<sup>5</sup> Peningkatan mutu berbasis sekolah yang diterapkan oleh pemerintah pada seluruh sekolah belum maksimal dan belum merata, salah satunya disebabkan oleh faktor geografis. Banyak sekolah di Indonesia yang letaknya sangat jauh untuk dijangkau. Sehingga tidak dapat mengembangkan kualitas pendidikan terutama mutu sekolah. Partisipasi masyarakat juga sangat minim terhadap pengembangan kualitas sekolah.

Partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yang masih rendah disebabkan oleh pengetahuan mereka yang sangat minim tentang pentingnya mutu pendidikan. Terutama pada masyarakat perbatasan yang letaknya sangat jauh dari pusat pengelolaan pendidikan. Masyarakat perbatasan hidup di daerah terpencil Indonesia yang merupakan batas wilayah maupun batas negara.

Hal itulah yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan Sulawesi Tengah bagian timur yang terus berupaya mengembangkan kualitas pendidikan terutama dalam meningkatkan mutu sekolah. Pada tahun 2005 pemerintah mendirikan sekolah negeri tingkat SMP di perbatasan Sulawesi Tengah yaitu di Desa Kasuari, Kecamatan Bongan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, yang diberi nama SMP Negeri 2 Bongan Kepulauan. Sekolah tersebut terus melakukan pengembangan terutama dalam meningkatkan mutu sekolah walaupun terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain letak sekolah yang sangat jauh dari pusat, masalah anggaran dan pengetahuan dalam mengelola sekolah yang sangat minim. Namun, tidak menghalangi semangat masyarakat perbatasan untuk mengembangkan sekolah dan menjadikan sekolah tersebut sebagai sekolah percontohan diseluruh perbatasan Sulawesi Tengah.

---

<sup>5</sup> Hamzah, "Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 1 (2013), hlm. 152.

Penelitian ini hadir dalam rangka untuk memotret proses peningkatan mutu berbasis sekolah serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan pendidikan di perbatasan dengan berbagai kompleksitasnya. Hal ini yang menjadi fokus kajian peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di Daerah Perbatasan, Pulau Timpaus, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah yakni SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis kualitatif deskriptif. Melalui penelitian ini, mengungkap dan menyikap fakta yang ada di lapangan (kondisi *real*)<sup>6</sup> yakni tentang fenomena proses peningkatan mutu berbasis sekolah yang dilakukan oleh SMP N 2 Bokan Kepulauan. Sementara sumber data dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber yakni, sumber data dokumen dan sumber data informan. Adapun informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini, ialah Civitas Akademika SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan yang diambil melalui teknik *purposive sampling* terdiri dari beberapa perwakilan guru, komite sekolah, dan wali murid. Dengan demikian, penelitian tentang manajemen mutu berbasis sekolah ini dapat memberikan gambaran mengenai proses peningkatan mutu daerah perbatasan yang terletak di bagian tengah Indonesia yakni Sulawesi Tengah, tepatnya di SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan.

### **Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)**

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS adalah sebutan atau nama lain dari manajemen berbasis sekolah (MBS). Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari "*School Based Management*". Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Untuk Indonesia, model baru pengelolaan sekolah ini diterapkan pada tahun 1999 di sejumlah sekolah dan madrasah rintisan dengan sebutan MPMBS. Adapun untuk negara-negara

---

<sup>6</sup> Herman Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1997), hlm. 21.

maju, seperti Amerika, Inggris, dan Australia model pengelolaan ini sudah disosialisasikan dan diterapkan sekitar tahun 1980-an.<sup>7</sup>

BPPN dan Bank Dunia, menjelaskan manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan, yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.<sup>8</sup> Nanang Fattah mendefinisikan manajemen berbasis sekolah sebagai pendekatan politik yang bertujuan mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan pada Kepala Sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat.<sup>9</sup>

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 49 ayat (1), yang dikutip oleh Sudadio yaitu "Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas".<sup>10</sup>

Selanjutnya, Rohiat menulis bahwa terdapat tujuh komponen manajemen sekolah, meliputi: (1) Manajemen Kurikulum; (2) Manajemen Program Pembelajaran atau Pengajaran; (3) Manajemen Tenaga Kependidikan; (4) Manajemen Kesiswaan; (5) Manajemen Keuangan; (6) Manajemen Sarana dan Prasarana; dan (7) Manajemen Hubungan Masyarakat. Mulyasa menambah satu komponen lagi yang menjadi komponen manajemen sekolah Manajemen itu adalah manajemen layanan khusus yang meliputi manajemen

---

<sup>7</sup> Imam Machali dan Ara Hidayat, *Hand Book of Education Management* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 366.

<sup>8</sup> Altje Tombakan, "Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*)," *Aptekindo*, n.d., hlm. 436.

<sup>9</sup> Muh. Sholeh, "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (*Case Study* Pelaksanaan Program MBS Rintisan di SD Negeri 2 Karang Sari Kecamatan Pejawaran Banjarnegara)," *Lembaran Ilmu Kependidikan* 39, no. 2 (2009), hlm. 126.

<sup>10</sup> Sudadio, "Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Banten melalui Manajemen Berbasis Sekolah," *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 16, no. 2 (2012), hlm. 555.

perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah.<sup>11</sup> Manajemen berbasis sekolah juga merupakan salah satu model manajemen strategi. Hal ini berarti meningkatkan pencapaian tujuan melalui pengerahan sumber daya internal dan eksternal.<sup>12</sup> Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik dan dapat bersaing secara nasional dan internasional dibidang pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Banyak faktor yang terabaikan oleh pemerintah pusat (ditingkat makro) dan sulitnya melaksanakannya ditingkat sekolah (mikro).<sup>13</sup> Oleh karena itu, esensi MPMBS adalah *otonomi sekolah plus pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah*.<sup>14</sup> Dalam hal peningkatan partisipasi, penelitian yang dilakukan Balitbang Diknas RI menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah masih rendah, yaitu rata-rata hanya 57,10%.<sup>15</sup> Sehingga penerapan MPMBS meliputi; proses belajar, perencanaan dan evaluasi program sekolah, pengelolaan kurikulum, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan peralatan dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, pelayanan siswa hubungan sekolah dengan masyarakat dan pengelolaan iklim sekolah.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> M. Thamrin Paskalis, Herculanus Bahari Sindju, "Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Kepemimpinan di SMA Negeri 3 Singkawang)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019), hlm. 3, doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

<sup>12</sup> Yusnaini, "Tugas Kepala Sekolah dalam Peningkatan Asas Manajemen Berbasis Sekolah," *Al-Ta'lim* 13, no. 1 (2014), hlm. 153.

<sup>13</sup> M. Yusuf Ibrahim, "Paradigma Baru dalam Pengelolaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* Vol. 1, no. 1 (n.d.), hlm. 33.

<sup>14</sup> Imam machali dan Ara hidayat, *Hand Book of Education Management*, hlm. 367.

<sup>15</sup> Ansar, "Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)," *Inovasi* 5, no. 2 (2008), hlm. 1.

<sup>16</sup> Bakhtiar, "Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)," *Al-Ta'lim* 12, no. 2 (2013), hlm. 179.

## Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

Melalui pendekatan sistem, karakteristik MPMBS yaitu adanya input-proses-output, digunakan untuk memandunya. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sebuah sistem, sehingga penguraian karakteristik MPMBS (yang juga karakteristik sekolah efektif) mendasarkan kepada input, proses dan output.<sup>17</sup>

*Pertama*, Input Pendidikan. Input pendidikan antara lain memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya tersedia dan siap, staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, memiliki harapan prestasi yang tinggi, fokus pada pelanggan (khususnya siswa) dan input manajemen.<sup>18</sup>

*Kedua*, Proses. Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses, seperti (1) Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi; (2) Kepemimpinan sekolah yang kuat; (3) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib; (4) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif; (5) Sekolah memiliki budaya mutu; (6) Sekolah memiliki “teamwork” yang kompak, cerdas dan dinamis; (7) Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian); (8) Partisipasi yang tinggi dari warga dan masyarakat; (9) Sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen; (10) Sekolah memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan fisik).<sup>19</sup>

*Ketiga*, output sekolah. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu prestasi akademik (*academic achievement*) dan prestasi non-akademik (*nonacademic achievement*). Output prestasi akademik, misalnya, lomba karya ilmiah remaja, lomba-lomba lain (seperti lomba bahasa inggris, matematika, fisika), cara berpikir (kritis, kreatif/divergen, nalar, rasional, induktif, deduktif, dan ilmiah). Output non-akademik, misalnya keinginan-tahuan yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, kesenian dan kepramukaan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Imam machali dan Ara hidayat, *Hand Book Of Education Management*, hlm. 369.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 373-374.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 371.

<sup>20</sup> *Ibid.*

## Pendidikan di Perbatasan

Masih terdapat berbagai permasalahan pendidikan di daerah terpencil, daerah tertinggal, ataupun daerah perbatasan. Sulitnya membangun sarana pendidikan yang memenuhi standar karena kesulitan komunikasi atau langkanya alat-alat bantu proses belajar mengajar. Begitu pula tuntutan sistem pendidikan yang standar mengenai jenjang pendidikan serta kurikulum nasional menghambat daerah 3T dan perbatasan untuk mengejar ketertinggalan.<sup>21</sup>

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa dibutuhkan strategi untuk akselerasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana. Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah perbatasan dan tertinggal termasuk daerah rawan bencana, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah tersebut.<sup>22</sup>

Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui beberapa kebijakan, yakni (1) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana; (2) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD satu atap, SD-SMP satu atap, dan sekolah berasrama di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana; dan (3) penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapat pendidikan formal dan nonformal di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 42 menuliskan bahwa setiap pendidik dituntut untuk memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang dipersyaratkan sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

---

<sup>21</sup> Ariningsih Suciati, "Pengembangan Model Pendidikan Menengah Sekolah Kebangsaan di Daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan sebagai Implementasi Pembelajaran PKn," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016), hlm. 77.

<sup>22</sup> Lia Rosliana et al., "Manajemen Perbatasan Fokus Inovasi Pendidikan di Perbatasan Kalimantan Utara 1," *Jurnal Borneo Administrator* 11, no. 3 (2015), hlm. 321.

nasional.<sup>23</sup> Fokusnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni menjadi aset serta potensi bangsa yang peranannya sangat vital dalam menopang pembangunan berbagai bidang. Ini merupakan amanat dalam konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Pendidikan menjadi fokus utama guna mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan mumpuni.<sup>24</sup>

Perlu diperhatikan bahwa realita yang dihadapi seorang guru, baik mengajar di daerah terpencil maupun di perkotaan adalah menghadapi murid dengan tingkat kemampuan dan kemajuan belajar yang berbeda.<sup>25</sup> Sehingga dalam mengajarpun perlu memperhatikan lingkungan dan kebiasaan peserta didik apalagi letaknya diperbatasan wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 361 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dengan dibantu oleh pemerintah daerah wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal.<sup>26</sup> Sehingga diperlukan inovasi pendidikan karena dengan ini memberikan upaya perbaikan, perubahan, pembaharuan, terobosan, penemuan dalam bidang pendidikan. Berbagai penemuan yang ada digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan, sehingga pendidikan berkembang menuju kepada yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harapan pemerintah.<sup>27</sup>

Rendahnya kualitas pendidikan di daerah perbatasan, antara lain disebabkan oleh rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, dan kurangnya pemerataan kesempatan

---

<sup>23</sup> Muhsinah Annisa Vlorensius, "Sinkronisasi Kompetensi Mahasiswa dengan Kompetensi Tuntutan Sekolah dalam Pelaksanaan PPL di Sekolah Dasar di Daerah Perbatasan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019), hlm. 1, doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

<sup>24</sup> Siti Muri'ah, "Strategi Pengembangan Pendidikan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus pada Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas Sebatik dan Nunukan)," *Fenomena* 10, no. 2 (2018), hlm. 137.

<sup>25</sup> Elsje Theodora Maasawet, "Model Pengelolaan Kelas Rangkap (PKR) untuk Sekolah Dasar yang Mengalami Kekurangan Guru di Daerah Perbatasan atau Terpencil di Provinsi Kalimantan Timur," *Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi* 8, No. 1 (2015), hlm. 1, Doi:10.20961/Bioedukasi-Uns.V8i1.2944.

<sup>26</sup> Rosliana et al., "Manajemen Perbatasan Fokus Inovasi Pendidikan di Perbatasan Kalimantan Utara 1," hlm. 321.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 320.

pendidikan.<sup>28</sup> Oleh karena itu, pendidikan di wilayah perbatasan memerlukan sentuhan khusus dan perhatian ekstra para ahli pendidikan.

Daerah perbatasan memerlukan sentuhan penyelenggaraan pendidikan bermutu agar mampu meningkatkan kualitas SDM-nya. Atas dasar itu, untuk menghasilkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di daerah perbatasan, sangat diperlukan perhatian dan analisis terhadap segenap sub-sistem atau komponen pendidikan yang ada, di antaranya, masukan siswa, sarana prasarana, ketenagaan, biaya pendidikan, kurikulum, dan hasil belajar.<sup>29</sup> Sehingga pendidikan di daerah perbatasan sangat memerlukan kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### **Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMP Negeri 2 Bongan Kepulauan**

Peningkatan mutu di SMP Negeri 2 Bongan Kepulauan pernah dilakukan oleh pihak sekolah yaitu tepatnya pada tahun 2012 dengan pengembangan “peningkatan mutu pendidikan di daerah terpencil”.<sup>30</sup> Pada tahun tersebut juga dilakukan workshop peningkatan mutu di daerah terpencil tingkat SMP. Namun, dalam pengembangan mutu tidak berjalan dengan baik dikarenakan kekurangan guru dan fasilitas yang tidak memadai.

Pada tahun 2015 sampai 2019, adanya kebijakan dari pemerintah untuk menempatkan guru di daerah tersebut. Pada tahun itu pula kepala sekolah melihat perkembangan mutu dapat berjalan maju jika dilakukan perubahan visi dan misi dengan memanfaatkan sumber daya manusia (dalam hal ini adalah guru) yang ada. Oleh karena itu, pihak sekolah merubah visi sekolah menjadi “mewujudkan sekolah dikenal berkualitas yang dapat menguasai iptek yang dilandasi dengan imtak”.<sup>31</sup> SMP Negeri 2 Bongan Kepulauan, berusaha mengembangkan sekolah yang efektif walaupun terbatas oleh dana dan sarana

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 321-23.

<sup>29</sup> Iskandar Agung, “Kajian Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Perbatasan,” *Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD NI* 7, no. 2 (2012), hlm. 175.

<sup>30</sup> Hasil wawancara bersama guru IPS SMPN 2 Bongan Kepulauan, pada tanggal 22 November 2019 jam 10.00-10.30 Wib

<sup>31</sup> Hasil wawancara bersama guru IPA SMPN 2 Bongan Kepulauan, pada tanggal 22 November 2019 jam 09.00 WIB

prasarana. Berikut ini hasil dari peningkatan mutu yang dilakukan kepala sekolah pada tahun 2012 sampai 2019, yaitu dilihat dari output-proses-input sebagai berikut:

1. Output SMP Negeri 2 Bongan Kepulauan

Prestasi yang pernah diraih oleh SMP Negeri 2 Bongan Kepulauan yaitu pada tahun 2017 menjadi perwakilan se-Kabupaten Banggai Laut untuk mengikuti perlombaan olimpiade sains dibidang IPA dan IPS. Selain itu, sekolah ini juga memberikan wakilnya dalam pertandingan olahraga cabang Bulu Tangkis di tingkat provinsi. Walaupun fasilitas sekolah masih sangat minim bahkan ada yang belum ada, tetapi peserta didik SMP Negeri 2 Bongan Kepulauan dapat mengharumkan nama masyarakat dan civitas akademika sekolah.<sup>32</sup>

Melalui berbagai prestasi tersebut, SMP Negeri 2 Bongan Kepulauan berhasil menjadi kebanggaan masyarakat karena dengan fasilitas seadanya, namun dapat menjadi perwakilan kabupaten untuk ikut di ajang bergensi tersebut. Prestasi tersebut juga menjadikan SMP Negeri 2 Bongan Kepulauan sebagai tauladan (sekolah percontohan) untuk seluruh sekolah di perbatasan. Selain itu, hal tersebut membuktikan bahwa berbagai kekurangan sarana prasarana dan aspek lain yang dimiliki sekolah di perbatasan tidak menjadi penghalang untuk berprestasi dan mampu melakukan perubahan di kelas nasional.

2. Proses SMP Negeri 2 Bongan Kepulauan

Karakteristik proses telah ditunjukkan oleh sekolah yang diselenggarakan di SMP N 2 Bongan Kepulauan. Dalam proses belajar mengajar, sekolah tersebut telah menerapkan kurikulum 2013, namun masih belum sepenuhnya efektif. Hal itu dikarenakan banyak fasilitas belajar yang masih kurang misalnya buku dan bahan praktik. Oleh karena itu, dalam beberapa kegiatan belajar, guru-guru masih kesulitan melakukan proses pembelajaran. Hal ini yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah agar bisa menerapkan kurikulum sesuai dengan fasilitas yang telah disiapkan agar penerapan kurikulum 2013 dapat berjalan dengan efektif.

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara bersama guru IPS SMPN 2 Bongan Kepulauan, pada tanggal 22 November 2019 jam 10.00-10.30 WIB

Selanjutnya, kepemimpinan di SMP N 2 Bokan Kepulauan belum maksimal. Sekolah ini belum dapat mengelola secara mandiri. Sekolah masih sangat berharap kepada pemerintah agar terdapat pemerataan terutama pada sumber dayanya. Kaitan dengan pengelolaan tenaga kependidikannya, masih terlihat belum efektif juga. SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan memiliki tenaga kependidikan pada tahun 2019 berjumlah PNS berjumlah 10, kontrak daerah 8 orang, dan 1 honorer dengan jumlah peserta didik 64 orang.<sup>33</sup> Awalnya sekolah kekurangan guru, namun sejak dibuka PNS ternyata sekolah tersebut menerima 7 PNS sehingga tenaga pendidik di SMP N 2 Bokan Kepulauan sangat cukup. Akan tetapi, jika dilihat dari jumlah siswanya, maka persentase jumlah guru lebih besar dibanding jumlah peserta didiknya.

Kemudian, kaitan dengan budaya mutu, SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan sangat menjunjung tinggi toleransi. Hal itu dapat dilihat dari keberagaman agama dan suku civitas akademiknya. Salah satu guru di sekolah tersebut ada yang beragama hindu. Pihak sekolah tidak pernah membedakan agama, suku dan lain. Sekolah juga sangat menghargai guru-guru dan peserta didik yang berprestasi. Diakhir semester ada *reward* yang diberikan kepada guru dan siswa yang berprestasi. Tujuannya untuk menambah semangat para guru dan peserta didik agar terus mengukir prestasi untuk negeri. Sekolah SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan telah mengembangkan budaya mutu sekolah dengan beberapa penerapan sekolah yang sangat berkaitan dengan peningkatan mutu sekolah. Hal ini dilakukan agar kedepannya sekolah dapat menjadi lebih baik lagi.

Prinsip selanjutnya adalah sekolah memiliki tim kerja yang kompak, cerdas dan dinamis. Kebersamaan (*teamwork*) di SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan dapat dilihat dengan kegiatan pramuka yang dilakukan oleh sekolah setiap tahunnya. Kegiatan pramuka tersebut atas inisiatif Kepala SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan yang melakukan kerja sama dengan Kepala SD Negeri Kasuari dan semua masyarakat Kasuari. Kegiatan tersebut sangat meriah karena melibatkan seluruh guru dari, SD, SMP, komite sekolah dan semua masyarakat. Walaupun hanya dilakukan

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara bersama guru IPS SMPN 2 Bokan Kepulauan, pada tanggal 22 November 2019 jam 10.00-10.30 WIB

satu tahun sekali, tetapi memberikan efek positif kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat sangat terlihat kompak dan saling bekerjasama menyukseskan kegiatan tahunan ini.<sup>34</sup> Sehingga kekompakan para warga sekolah dan masyarakat mulai tumbuh pada kegiatan tersebut. Dengan demikian, diharapkan sekolah dapat mempertahankan kegiatan ini agar hubungan masyarakat dengan sekolah menjadi lebih harmonis.

Prinsip selanjutnya adalah kewenangan (kemandirian) dan partisipasi masyarakat. Walaupun desentralisasi pendidikan telah diberikan kepada setiap sekolah, SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan belum sepenuhnya mandiri. Sekolah ini masih sangat tergantung kepada pemerintah. Hal itu dikarenakan Kepala Sekolah tidak mempunyai manajemen yang kuat dalam mengelola sekolah. Kaitannya dengan partisipasi warga masyarakat, masih tergolong rendah partisipasi masyarakatnya. Masyarakat hanya dilibatkan dalam kegiatan kepramukaan yang diadakan tiap tahunnya. Para wali murid masih jarang dilibatkan selain kegiatan kepramukaan tersebut.<sup>35</sup> Hal ini dapat menjadi penyebab kurang majunya sekolah karena partisipasi masyarakat masih kurang terhadap pendidikan.

Karakteristik proses selanjutnya adalah adanya transparansi dan komitmen sekolah untuk melakukan perubahan. Transparansi atau keterbukaan di SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan, ditunjukkan kepala sekolah melalui pengambilan keputusan yang melibatkan warga sekolah. Kepala sekolah menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Banyak kebijakan beliau sesuai dan mengikuti hasil rapat baik dengan guru-guru, komite sekolah atau wali murid. Walaupun letak sekolah sangat jauh dari kabupaten, akan tetapi tidak menuntut mereka menutupi diri dengan budaya luar. Mereka sangat merespon dengan adanya perubahan, seperti guru-guru yang ditempatkan oleh pemerintah di desa tersebut, sebagian besar berasal dari Makassar sehingga memberikan dampak yang berbeda terhadap budaya setempat dan budaya yang dibawa oleh guru tersebut.

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara bersama Komite SMPN 2 Bokan Kepulauan, pada tanggal 23 November 2019 jam 16.00 WIB

<sup>35</sup> Hasil wawancara bersama wali murid (Masyarakat), pada tanggal 23 November 2019 jam 14.30 Wib

Masyarakat sangat senang dan menerima perbedaan tersebut sebagai pengetahuan baru mereka untuk saling menghargai.

3. Input SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan

SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas. Visi SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan yaitu mengembangkan IPTEK dan menjunjung tinggi IMTAQ. Melalui visi tersebut, sekolah dapat mengembangkan mutu pendidikan di wilayah perbatasan. Namun, sumber daya di sekolah tersebut belum semuanya tersedia dan siap. Sumber daya SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan masih sangat minim terutama fasilitas sekolah seperti perpustakaan yang sampai hari ini belum dapat disediakan. Selain itu, fasilitas laboratorium IPA dan komputer juga belum tersedia.<sup>36</sup> Dengan demikian, sekolah ini masih sangat memerlukan sumber daya yang menopang untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Salah satu yang sifatnya segera dipenuhi adalah buku, agar literasi atau budaya membaca anak di perbatasan sesuai dengan harapan bangsa.

Input selanjutnya berkaitan dengan sumber daya manusia di SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan. Sekolah tersebut mempunyai guru yang sudah sesuai dengan bidangnya. Hidup dan bertahan hidup di wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, para guru yang ditempatkan di wilayah tersebut, beberapa minta untuk pindah tugas karena mereka belum bisa beradaptasi dengan lingkungan perbatasan. Loyalitas para guru sangat dibutuhkan untuk mengembangkan pendidikan di wilayah perbatasan.

SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan kedepannya. Sekolah ini memiliki harapan prestasi yang tinggi. SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan punya harapan agar menjadi contoh sekolah perbatasan yang unggul dibidang IPTEK dan IMTAQ. Siswa sekolah tersebut berasal dari dua desa, yakni desa Kasuari (desa tempat sekolah berdiri) dan desa Timpaus (sebelah desa tempat sekolah

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara bersama guru IPS SMPN 2 Bokan Kepulauan, pada tanggal 22 November 2019 jam 10.00-10.30 Wib

itu didirikan).<sup>37</sup> Letaknya yang terpencil sehingga tidak memungkinkan peserta didik di luar pulau untuk bersekolah di pulau tersebut. Namun, sekolah tetap memberikan pelayanan dan fokus terhadap para siswa yang mempercayakan pendidikannya di SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan.

## **Simpulan**

Manajemen Berbasis Sekolah yang diwujudkan melalui Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan faktor kemampuan sumber daya manusia di sekolah tersebut belum mumpuni dalam melaksanakan proses manajemen berbasis sekolah. Manajemen kepala sekolah yang masih kurang, manajemen guru masih perlu adanya perbaikan, letak sekolah yang sangat jauh sehingga belum mampu tumbuh seperti manajemen peningkatan mutu yang diharapkan, sarana prasana masih sangat kurang, dan partisipasi masyarakat yang rendah terhadap sekolah tersebut. Walaupun diberikan otonomi oleh Pemerintah melalui desentralisasi pendidikan, namun SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan masih sangat tergantung kepada pemerintah (belum dapat mengelola sekolah secara mandiri). Untuk mensosialisasikan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah perlu adanya bimbingan kepada kepala sekolah, guru dan semua pihak yang terlibat dalam sekolah agar mutu sesuai dengan harapan peserta didik di perbatasan.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara guru matematika SMPN 2 Bokan Kepulauan, pada tanggal 22 November 2019 jam 13.00 Wib

## Daftar Referensi

- Agung, Iskandar. "Kajian Penyelenggaraan Pendidikan Di Daerah Perbatasan." *Jurnal Ilmiah Visi P2TK PAUD NI* 7, no. 2 (2012): 173-84.
- Ansar. "Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)." *Inovasi* 5, no. 2 (2008): 1-19.
- Bakhtiar. "Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)." *At-Ta'lim* 12, no. 2 (2013).
- Hamzah. "Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 1 (2013): 151-75.
- Ibrahim, M. Yusuf. "Paradigma Baru dalam Pengelolaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah." *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol. 1*, no. 1 (n.d.).
- Ibrohim, Busthomi. "Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi Alternatif dalam Persaingan Mutu." *Al-Qalam* 22, no. 2 (2005).
- Machali, Imam dan Ara hidayat. *Hand Book of Education Management*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Maasawet, Elsje Theodora. "Model Pengelolaan Kelas Rangkap (PKR) Untuk Sekolah Dasar Yang Mengalami Kekurangan Guru Di Daerah Perbatasan Atau Terpencil Di Provinsi Kalimantan Timur." *Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi* 8, no. 1 (2015). doi:10.20961/bioedukasi-uns.v8i1.2944.
- Muri'ah, Siti. "Strategi Pengembangan Pendidikan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Pada Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas Sebatik dan Nunukan)." *Fenomena* 10, no. 2 (2018).
- Paskalis, Herculanus Bahari Sindju, M. Thamrin. "Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Kepemimpinan di SMA Negeri 3 Singkawang)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689-99. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
- Qur'ani Habib, Abdau, and Imam Machali. "Efektivitas Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Perspektif *Balanced Scorecard* Terhadap Mutu Pembelajaran Siswa Kelas XI dan Kelas XII di MAN Maguwoharjo Sleman." *Jurnal Pendidikan Madrasah* 1, no. 2 (2016): 213-32.
- Roslina, Lia, Fani Heru W, Wildan Lutfie, Kemal Hidayah, Noor Aziza, JI H M Ardan, and Ringroad Iii. "Manajemen Perbatasan Fokus Inovasi Pendidikan di Perbatasan Kalimantan Utara 1." *Jurnal Borneo Administrator* 11, no. 3 (2015): 316-39.

- Sastradiharja, EE Junaedi. "Manajemen Sekolah Berbasis Kompetensi." *Mumtaz* 2, no. 2 (2018).
- Sholeh, Muh. "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (*Case Study* Pelaksanaan Program MBS Rintisan di SD Negeri 2 Karangsari Kecamatan Pejawaran Banjarnegara)." *Lembaran Ilmu Kependidikan* 39, no. 2 (2009): 124–31.
- Sri Marsini, Sri Witurachmi, Elvia Ivada. "Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMA N 1 Sukoharjo." *Jupe Uns* 1, no. 1 (2013): 1–13.
- Suciati, Ariningsih. "Pengembangan Model Pendidikan Menengah "Sekolah Kebangsaan di Daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan sebagai Implementasi Pembelajaran PKn." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016).
- Sudadio. "Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Banten Melalui Manajemen Berbasis Sekolah." *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 16, no. 2 (2012): 246–67.
- Tombokan, Altje. "Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Managemet*)." *Aptekindo*, n.d.
- Vlorensius, Muhsinah Annisa. "Sinkronisasi Kompetensi Mahasiswa dengan Kompetensi Tuntutan Sekolah dalam Pelaksanaan PPL di Sekolah Dasar di Daerah Perbatasan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
- Wasito, Herman. *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Utama, 1997.
- Yusnaini. "Tugas Kepala Sekolah dalam Peningkatan Asas Manajemen Berbasis Sekolah." *Al-Ta'lim* 13, no. 1 (2014).
- Yustiani. "Nasionalisme Melalui Pendidikan di Sekolah pada Siswa SMA di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat." *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi* 04, no. 01 (2018): 111–24.